

SEJARAWAN, KEARIFAN LOKAL, DAN PARIWISATA NUSANTARA¹

I Ketut Ardhana²
Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia
(MSI Cabang Bali)

Abstrak

Tidak banyak daerah yang beruntung untuk mampu mengembangkan industri pariwisatanya sebagaimana dapat dilihat pada Bali, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya. Berbagai prestasi dicapai dan juga berbagai dampak yang muncul sebagai akibat pengembangan kawasan pariwisatanya. Di antara prestasi itu, bahkan di satu pihak, seperti Bali misalnya yang diberikan julukan sebagai Pulau Terindah di Dunia dan di pihak yang lainnya, semakin tegerusnya budaya pertanian yang menjadi primadona bagi masyarakat Bali di masa lalu. Landasan filosofi pembangunan Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana pun dipertanyakan. Bagaimana peran sejarawan menyikapi persoalan ini, karena masalah pariwisata adalah masalah semua pihak, termasuk sejarawan dalam mengembangkan wisatawan yang berkelanjutan tanpa tercerabut dari akarnya. Berkaitan dengan ini, maka pertanyaan utama yang akan dibahas sekitar, pertama: bagaimana kearifan lokal itu dapat dimaknai? Kedua: bagaimana mengembangkan kawasan wisata yang berwawasan kearifan lokal? dan ketiga, apa yang dapat dilakukan dalam mengemas, sehingga kearifan lokal yang dimiliki dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan pariwisata, tanpa memperlemah budaya lokal yang dimilikinya itu? Inilah beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam kajian ini dengan harapan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mempertahankan kearifan lokal di tengah-tengah derunya arus globalisasi yang melanda dunia pada umumnya, dan kawasan nusantara pada khususnya.

Kata Kunci: sejarawan, kearifan lokal, dan pariwisata nusantara.

I. Pendahuluan

Di Indonesia pada masa lalu peran sejarawan cenderung dikaitkan dengan kegiatan seorang penulis sejarah yang berkaitan dengan masalah-masalah besar, seperti sejarah politik yang berkaitan dengan sejarah raja dan istananya, sejarah kenegaraan dan isu-isu besar lainnya yang umumnya berkaitan dengan politik. Tidak mengherankan kemudian, jika seorang penulis sejarah ingin mengkritisi kebijakan penguasa pada zamannya, seperti pada masa kerajaan-kerajaan tradisional menguraikannya dalam bentuk yang dikenal seperti babad. Karena alasan keamanan seringkali si penulis tidak menyebutkan namanya sendiri, karena khawatir kalau raja atau penguasa akan menghukumnya akibat karya sastra yang dituliskannya itu. Di sinilah memang

¹ Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional IKAHIMS I XXI dan Musyawarah Nasional IKAHIMS I X, dengan tema "Peranan Sejarawan dalam Melestarikan Kearifan Lokal Sebagai Aset Pariwisata", diselenggarakan oleh Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Se Indonesia (IKAHIMS I) di Auditorium Widya Sabha Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana pada Senin, 13 November 2017.

² Penulis adalah Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Bali (MSI Bali) dan Ketua Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Udayana Denpasar-Bali.

diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan sumber tradisional seperti *babad* seperti di Bali dan Jawa, *tambo* dikenal di Sulawesi, *hikayat* di tanah Melayu, dan *Bo* seperti yang dikenal di Sumbawa sebagai bahan kajian sejarah.

Namun demikian, ini tidaklah berarti, bahwa dalam karya sastra itu semuanya merupakan mitos. Adapun alasannya, meskipun sumber-sumber yang disebutkan itu tidak menyebutkan detail tentang pengarangnya, karena ada kekhawatiran-kekhawatira itu, paling tidak terdapat hal-hal yang tersirat dalam karya itu yang mengandung nilai-nilai kebenarannya. Dalam kajian-kajian postmodern misalnya dapat disebutkan bagaimana sebuah candi, pura, atau pagoda, mesjid, gereja, makam, dan sebagainya sebagaimana dipersepsikan oleh Michael Foucault dalam bukunya yang berjudul, *Arkeologi Pengetahuan* (1976) menyatakan, bahwa tinggalan-tinggalan arkeologi yang berupa candi, monumen-monumen itu dapat dipandang sebagai sebuah teks yang dapat memberikan sebuah kisah, pesan kepada orang yang melihatnya. Paling tidak, ada pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pembuatnya dalam bentuk nilai-nilai, pandangan-pandangan hidup (*intangible culture*) dalam karya berupa budaya fisik (*tangible culture*) sebagaimana terdapat pula pada bangunan suci lainnya seperti pura, gereja, mesjid, makam, dan sebagainya itu. Dalam hal ini dapat dimaknai bagaimana teks dan konteks itu perlu dicermati dalam penulisan sebuah karya sejarah.

Akan tetapi, perkembangan teori metodologi sejarah yang berkiblat ke Barat seperti yang dikembangkan dalam tradisi Jerman dengan tokohnya Leopold von Ranke yang memandang sejarah hendaknya ditulis sebagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, "*was es eigentlich gewesen ist*" menyebabkan tulisan-tulisan sejarah harus berkiblat pada hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, dimana penggunaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang diharuskan. Pemahaman seperti ini menyebabkan sejarawan cenderung memahami sejarah sebagai ruang yang menuntut akan adanya catatan resmi kerajaan atau kenegaraan, sehingga diktum sejarah "*no document no history*" menjadi penting adanya. Ketika menghadapi begitu kompleksnya persoalan dinamika kehidupan di masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan kekinian, maka paradigma atau pemikiran pengembangan sejarah yang lebih aktual menjadi penting adanya pula. Ini tidaklah berarti, bahwa para sejarawan, peneliti sejarah, penggiat sejarah, peminar sejarah meninggalkan keharusan untuk memahami akan pentingnya sumber sejarah, karena bagaimanapun juga sumber sejarah menjadi "*backbones*" atau tulang punggung bagaimana sebuah peristiwa sejarah dikonstruksikan.

Namun demikian, dalam dunia yang sudah memasuki masa modern, bahkan dianggap sudah memasuki era postmodern, postkolonial, poststruktural, tampak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan arus bawah atau akar rumput (*grass roots*) hendaknya mendapat perhatian signifikan, sehingga "kue-kue pembangunan" tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, atau kelompok yang terbatas, tetapi hendaknya menjadi bagian yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas pada umumnya.

Ini berarti, bahwa sudut pandang (*mindset*) mulai memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok atau komunitas lokal yang kurang diperhatikan, yang umumnya mereka hidup dalam keterbelakangan, tertindas, terhegemoni, termarginalisasi, sehingga perebutan ruang menjadi hal yang krusial yang tidak hanya menimbulkan persoalan-persoalan atau riak-riak sosial di masyarakat, atau konflik sosial, bahkan menjurus ke persoalan-persoalan disintegrasi bangsa.

Di sinilah pentingnya peran sejarawan hendaknya dimunculkan, sehingga penulis-penulis sejarah tidak hanya tercurah perhatiannya pada masalah-masalah makro, seperti penulisan biografi-biografi politik tokoh semata, melainkan mulai memikirkan tentang peran orang kecil atau komunitas kecil atau lokal, tetapi memiliki makna besar yang mencakup kepentingan masyarakat banyak. Ini menjadi penting adanya, karena Indonesia pada umumnya dikenal sangat kaya dengan berbagai pengaruh kebudayaan India dan Tiongkok, namun tidak tercerabut dari akar budaya lokalnya yang sudah berkembang pada masa prasejarah, sejarah klasik, sejarah modern hingga sejarah postmodern.

Pemahaman tentang dimensi-dimesi kelampauan sangatlah penting, sehingga akan mempermudah pemahaman masyarakat Indonesia di masa kini, dan dapat melangkah ke arah masa depan yang lebih baik. Dengan elaborasi kekayaan budaya lokal, hendaknya dapat memperkuat budaya nasional dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi perkembangan budaya dunia yang universal.

II. Memaknai dan Mengaktualisasikan Kearifan Lokal:

Dari Sentral ke Pinggiran Kekuasaan

Sejak masa tradisional, kolonial, hingga kemerdekaan tampaknya masyarakat dibebani dengan persoalan-persoalan yang berada di pusat kekuasaan. Pada masa kerajaan misalnya bagaimana

peran kekuasaan pusat menjadi sangat penting, sehingga ada konsep kuta negara, negara agung, dan manca negara. Hanya di kawasan-kawasan yang berada dekat dengan kekuasaan seperti di kuta Negara, mendapat prioritas dalam masalah masalah kemakmuran, sedangkan yang lainnya yang disebut dengan mancanegara tampaknya terabaikan. Sama halnya ketika masa kolonial masalah pemikiran ini tampaknya masih dilanjutkan. Dengan pengertian, bagaimana pentingnya penguasa lokal bagi kepentingan penguasa kolonial, sehingga mampu mempertahankan pengaruhnya dalam kurun waktu yang lama di Nusantara.

Bagi mahasiswa sejarah tentu sudah paham benar, bahwa Indonesia tidaklah dijajah selama 350 tahun. Itu dikatakan sebagai sebuah mitos yang diragukankan kebenarannya, karena pengaruh dominan di Indonesia tidaklah selama yang dikatakan itu. Misalnya kesultanan Aceh pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 baru dapat dianeksasi oleh Belanda. Bali demikian pula halnya baru pada awal abad ke-20 tepatnya tahun 1906 berhasil ditaklukkan oleh penguasa Belanda. Berbagai pertanyaan muncul berkaitan dengan pengaruh Belanda di Indonesia ini, sekitar masalah sosial budaya, ekonomi, dan politik baik pada masa era kolonial, maupun pada era setelahnya.

Disadari atau tidak, tentu berbagai dampak yang terjadi akibat penjajahan Belanda tentu ada pengaruhnya, baik yang positif, maupun yang negatif. Paling tidak, dalam konteks suasana menjadi sebuah bangsa yang merdeka tentu ada pengaruhnya. Dapat dibayangkan, bagaimana ketika negeri di Nusantara ini sebelum berhasil ditaklukkan oleh Belanda diwarnai oleh perang, antar kerajaan, konflik antar suku, dan, bahkan konflik mengenai sumber air seperti yang terjadi di Bali misalnya. Ini dapat dilihat dari laporan yang ditulis oleh J. J. Caron, *Memorie van Overgave van de Resident van Bali en Lombok*, (1929: 35—37), (cf. Schwartz, 1900: 178—179; lihat juga: *Geguritan Rusak Gianyar*), dengan adanya perebutan masalah subak yang terjadi antara Kerajaan Gianyar (Ubud) dan Kerajaan Badung misalnya dan pada akhirnya didirikan Kerajaan Kesiman di sebelah timur Badung untuk mengantisipasi upaya-upaya perlawanan dari Gianyar misalnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tidak jarang, bahwa konflik antar komunitas satu dengan komunitas yang lain terjadi berkaitan dengan perebutan sumber air atau penguasaan sumber air yang dikenal dengan subak itu. Inilah masalah sosial yang banyak terjadi bumi Nusantara sebelum Belanda berhasil menerapkan kebijakan *Pax Neerlandica*-nya.

Belanda sendiri tampaknya tidak mempermasalahkan budaya lokal yang ada sepanjang hal tersebut tidak diangkat ke tataran politik. Sebagai contoh pada saat terjadinya perang Aceh, sepanjang nilai-nilai sosial budaya yang mendukung kerukunan dan ketakwaan masyarakat Aceh dikembangkan, maka tidak dipersoalkan. Namun, jika nilai-nilai budaya Aceh seperti ide Perang Sabil diangkat ke permukaan dalam menggerakkan masyarakat Aceh untuk melawan Belanda tentu akan dimusnahkan oleh Belanda. Dari deskripsi ini dapat dipahami, bahwa bagaimana Belanda sebenarnya sudah memandang nilai-nilai sosial budaya Aceh sebagai asset politik (*political asset*) yang berbahaya bagi kekuatan Belanda di Indonesia.

Demikian pula halnya, terlebih-lebih konsep pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dan bersifat sentralistis seperti di masa Orde Baru yang berkuasa lebih dari 32 tahun tampaknya mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tampaknya apa yang dilakukan oleh Belanda ini juga masih sering muncul dalam dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia. Apa yang diterapkan di masa lalu, baik pada masa tradisional, kekuasaan kolonial dan juga di era Orde Baru itu tampaknya menanamkan pemahaman tentang tidak terlalu berartinya masyarakat di daerah-daerah yang terpinggirkan.

III. Mengembangkan Kawasan Wisata yang Berwawasan Kearifan Lokal

Banyak hal yang dapat muncul sebagai akibat paradigma pemikiran yang bersifat sentralistis dan authoritarian sebagaimana dikembangkan pada masa Orde Baru. Dicoba dipahami, bahwa bagaimana melihat sebuah kawasan hendaknya dikembangkan secara seimbang dengan pusat. Ini berarti, bahwa paradigma yang melihat wilayah perbatasan sebagai halaman belakang "*backyard*", hendaknya dirubah menjadi "halaman depan sebuah negara" atau "*frontyard*."

Ada sebuah contoh yang dapat diamati bagaimana komunitas lokal hanya menjadi "penonton" di daerahnya sendiri. Misalnya saja ketika penelitian perbatasan dilakukan di tahun 2000-an (2003/2004), tampak kegiatan wisata di wilayah perbatasan seperti di perbatasan antara Long Bawan (Kalimantan Indonesia) dan Ba Kelalan (Kalimantan Malaysia) dilakukan pemandu wisatanya oleh orang-orang Malaysia yang membawa para wisatawan ke wilayah pedalaman Kalimantan di wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana daya saing komunitas di sana cukup lemah ketika bersaing dengan komunitas yang ada di wilayah Malaysia. Pendidikan

ketrampilan tampaknya masih lemah demikian juga halnya dengan penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris.

Kebijakan pemerintahan masa reformasi tampaknya memberikan harapan akan perbaikan yang dapat dilakukan di wilayah perbatasan khususnya perbatasan antara Kalimantan Indonesia dan Kalimantan Malaysia. Misalnya pemberian ketrampilan-ketrampilan khusus yang berkaitan dengan wilayah perbatasan seperti masalah pengenalan potensi kekayaan Kalimantan sebagai paru-parunya dunia seperti berbagai macam vegetasi atau tanaman anggrek yang diharapkan dapat menarik minat wisatawan nusantara dan mancanegara.

Pengembangan daya kreatifitas dan inovasi juga hendaknya perlu dikembangkan. Di Semenanjung Malaysia di Kuala Lumpur untuk menarik minat wisatawan dipertunjukkan sebuah diorama tentang kisah Mashyuri kepada wisatawan yang berkunjung. Kisah Mashyuri itu sebenarnya bukanlah kisah sejarah Malaysia, melainkan cerita mitos yang dikembangkan sebagai asset wisata Malaysia. Demikianlah daya kreativitas dan inovasi yang dikembangkan di Malaysia. Bahkan, untuk menarik wisatawan itu dipergunakan slogan pariwisatanya yang dikenal dengan "*Malaysia is truly Asia*", yang mengandung makna bahwa semua budaya yang ada di Asia dapat dijumpai di Malaysia. Dengan kata lain, tidak usah mengunjungi Negara lainnya di Asia, budaya-budaya Asia itu dapat dilihat di Malaysia sekali berkunjung ke Malaysia. Strategi kebudayaan dan pariwisata tampaknya dilakukan Malaysia untuk dapat menarik wisatawan asing ke negerinya. Berbagai upaya dilakukan Malaysia untuk memenangkan persaingan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.

Komunitas lokal di wilayah Indonesia memang dibuat ketergantungan dengan Malaysia. Mereka bahkan dianggap seolah-olah *inferior* dari komunitas adat yang ada di wilayah Malaysia misalnya. Berikut dapat dilihat adanya penggunaan kata "*Orang Indon*" (orang Indonesia, yang kebanyakan pekerja pendatang berasal dari Jawa, Nusa Tenggara) (Cf. Ananta, et al. 2015) kepada orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dengan demikian, tampak bahwa komunitas Dayak yang terletak di bagian Indonesia dibuat ketergantungan dengan komunitas Dayak yang ada di bagian Malaysia khususnya di negeri Sarawak dan Sabah (Ardhana, 2008, cf. tentang identitas Dayak, lihat: Maunati, 2004). Dari pemaparan di atas tampak, betapa pentingnya membahas masalah sejarah migrasi, sejarah sosial budaya (Tirtosudarmo, 2005), yang terdapat di perbatasan dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata di wilayah itu dalam kaitannya dengan fenomena pariwisata.

Perlu dicatat, bahwa berbeda dengan Indonesia yang tidak hanya kaya dengan cerita mitos, tetapi sangat kaya dengan kisah sejarah yang sangat potensial untuk dikembangkan yang dimiliki oleh berbagai wilayah di Indonesia yaitu di masing-masing kabupaten dan kotanya. Kekayaan tradisi masa lalu yang banyak berorientasi pada cerita epos Mahabharata dan Ramayana (Staab, 1997), tampak berakar kuat, demikian juga pada tradisi yang berlatar belakang kisah Panji misalnya, yang tidak hanya dikenal di Jawa Timur dan Bali saja, bahkan sudah sampai ke Thailand yang telah menjadi bahan bacaan anak-anak sekolah di negeri Gajah Putih itu. Cerita panji seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Thailand. Masyarakat Thailand menyebutnya dengan Cerita Inao atau Eynao.

Cerita Panji merupakan sastra klasik yang aslinya berasal dari Indonesia, khususnya Jawa Timur. Cerita Panji ini memiliki latar belakang sejarahnya dari Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala yang telah menyebar luas ke seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra, Kalimantan, hingga ke mancanegara seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos dan akhirnya Myanmar. Inti cerita Panji ini mengisahkan tentang percintaan Raden Panji Asmarabangun (Inu Kertapati atau Panji Kudawanengpati), putra mahkota Kerajaan Jenggala dengan Dewi Sekardaji (Galuh Candrakirana) putri Kerajaan Kediri. Akan tetapi, perjalanan kisah cinta sepasang sejoli ini dikatakan tidak berjalan mulus yang mengisahkan petualangan dan penyamaran hingga Cerita Panji ini mengalami perkembangan banyak versi berupa dongeng dan yang lainnya (Lihat lebih jauh: Nurcahyo, 2017: 15). Kisah Panji ini semakin dibicarakan, semakin banyak yang bertanya-tanya mengenai siapa sebenarnya Panji itu. Akan tetapi, sayang sekali jangankan masyarakat awam, kalangan terpelajar pun banyak yang tidak mengetahui tentang kisah Panji ini. Di kalangan generasi muda di Jawa Timur misalnya yang merupakan asal daerah cerita Panji ini, tidak banyak yang memahaminya. Tidak hanya tentang Panji, kisah Calonarang yang terjadi di Kediri Jawa Timur tidak banyak diketahui oleh komunitas lokal. Padahal kisah cerita Calonarang yang berasal dari masa sejarah Jawa klasik itu berasal dari Kediri Jawa Timur, tetapi mengalami keterkenalannya di Bali, hingga dewasa ini (Ardhana, Setiawan, Sulanjari, dan Wahyuni, 2015).

Cerita Panji yang dikenal luas masyarakat Bali yang berkaitan dengan drama gong misalnya yang alur ceritanya diambil dari cerita Panji ini juga sudah mulai dilupakan atau jarang dipertunjukkan dalam pertunjukkan di Bali. Padahal di era 1970-an sampai era 1980-an dapat mengalami puncak penyelenggaraan pertunjukannya. Oleh karena itu, dapat dipahami

bagaimana proses globalisasi yang melanda masyarakat Indonesia tampak memberikan pengaruh terhadap generasi sekarang ini yang lebih menyukai kisah-kisah pada film-film dari luar daripada kisah yang terdapat pada tradisi mereka sendiri.

Namun pertanyaannya adalah bagaimana sejarawan, pemerhati sejarah, penggiat sejarah berupaya agar dapat menemukan bagaimana caranya menyikapi situasi seperti ini? Jika hal ini tidak dilakukan, maka kita akan menjadi penonton dan asing di negeri kita sendiri. Upaya-upaya kreatif dan inovatif hendaknya harus dikembangkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing di bidang kepariwisataan di Indonesia pada khususnya, dan di Asia Tenggara pada umumnya.

IV. Tradisi, Kearifan Lokal, dan Pariwisata Nusantara

Tradisi lisan memainkan peran signifikan dalam menjaga kohesi sosial. Seringkali terjadi kesalahan dalam mengartikan apa yang dimaksudkan dengan tradisi atau tradisi lisan (*oral tradition*). Tradisi itu sering dipandang sebagai sesuatu yang sudah lampau yang sudah ketinggalan zaman (*out of date*). Dalam prakteknya tradisi lisan itu memiliki makna yang tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi masih tetap hidup dan berlangsung hingga saat ini dalam kehidupan komunitas masyarakat (*What it was, what it is*).

Tidak banyak studi yang dilakukan tentang masalah tradisi, kearifan lokal, dan pariwisata nusantara saat ini. Kawasan wilayah di perbatasan seringkali sangat “sunyi-senyap” jika dibandingkan dengan hingar bingarnya aktifitas manusia di wilayah-wilayah perkotaan sebagai sentra-sentra kebudayaan. Di perbatasan sering dianggap tidak ada dinamika kebudayaan, padahal komunitas yang menempati wilayah perbatasan juga memiliki aktifitas budaya yang tidak hanya di komunitas tersebut tetapi malahan lintas batas Negara (*crossing borders*). Dalam artian gerakan mereka tidak terlalu dibatasi oleh konsep sebuah negara modern. Dengan demikian relasi sosial yang terjadi tampak tetap berlangsung, meskipun dalam hal-hal tertentu mereka dibatasi apabila ada isu-isu politik yang menyangkut hubungan antar-negara (Ardhana, 2017b).

Sebagaimana sering terjadi di masa lalu dalam kaitannya konflik perbatasan yang menyangkut masalah pulau Sipadan dan Ligitan, dan isu-isu pulau lainnya sering menimbulkan goncangan politik di tingkat pusat baik di Jakarta, maupun di Kuala Lumpur. Tidak jarang karena ketidakstabilan politik di tingkat pusat atau sentral kekuasaan itu juga berdampak pada hubungan atau relasi antar-negara yang terdapat di perbatasan seperti yang terlihat di perbatasan

antara Malaysia Timur atau Sabah (seperti Tawau, Long Pasia) Kalimantan Utara atau Nunukan di Kalimantan bagian Indonesia (Ardhana, 2007; lihat pula: Wiratri, 2010).

Meskipun terjadi dinamika di sentra kekuasaan misalnya, namun kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Relasi sosial budaya yang terjadi itu menurut beberapa data arkeologi dan sejarah yang ditemukan menunjukkan, bahwa di Kalimantan Utara (dahulu sebelum pemekaran tahun 2012, termasuk wilayah Kalimantan Timur) misalnya, relasi sosial yang ada dalam kaitannya dengan dinamika sosial budaya dan ekonomi sudah berlangsung cukup lama (Pongtuluran, 2013). Komunitas yang ada di wilayah tersebut memiliki tradisi atau tradisi lisan yang sudah saling menguntungkan kedua belah pihak komunitas tersebut (Ardhana, 2017a). Dari catatan prasejarah dan sejarah di perbatasan Malaysia dan Indonesia di Kalimantan dapat dilihat bagaimana sebuah komunitas sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi lisan yang sudah berkembang sejak lama itu (Shuhaimi, 2016).

Yang menarik adalah bahwa adanya konsep Ulu Padas yang masih dihormati oleh kedua belah pihak komunitas tersebut. Kata Ulu Padas berarti "hulunya batu atau puncaknya batu". Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep Ulu Padas adalah konsep kosmologi yang terdapat pada komunitas tersebut yang umum terjadi pada masyarakat yang memiliki tradisi prasejarah yang kuat di masa lalu. Konsep ulu padas ini ada kaitannya dengan konsep kosmologi gunung atau batu di pegunungan yang merupakan pemahaman komunitas adat tentang seberapa jauh konsep ini dikaitkan dengan konsep kesucian atau gunung suci sebagai tempat dimana para leluhur mereka dianggap berasal. Tentu ini didasari pada tradisi lisan yang berkembang di komunitas adat Dayak yang dipercayai sudah ada ada secara turun temurun. Nilai-nilai kelisanan masih dipertahankan dan dipelihara hingga sekarang yang sangat bermakna sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang dipergunakan bagi mereka dalam mewujudkan ikatan-ikatan sosial yang kuat dan berakar di komunitas perbatasan. Dapat dipahami tradisi lisan ini sangat penting maknanya dan kedua belah pihak komunitas sepakat, bahwa di batu padas yang dikenal sebagai Ulu Padas inilah sebagai tempat berkumpul dimana ritual adat biasa. Nilai-nilai kelisanan sebagai kearifan lokal itu merupakan pedoman atau dijadikan pola panutan oleh masyarakat mulai dari tokoh adat, dan tokoh agama.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tradisi itu tidak hanya merupakan yang berkaitan dengan masa lalu, tetapi berkaitan dengan kekinian. Tradisi lisan yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal itu ternyata sangat efektif dalam merekat perasaan kesamaan etnisitas

apabila terjadi gangguan-gangguan yang mengancam eksistensinya. Ini dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan bersama antara dua komunitas yang memiliki etnisitas yang sama tetapi karena terjadinya negara modern mereka saling terpisahkan berdasarkan kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia (Ardhana, Langub, dan Chew, 2004, cf. Goldschneider, 1995). Misalnya bagaimana halnya ketika ada peringatan kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada setiap tanggal 17 Agustus tiap-tiap tahunnya itu, tampak kedua komunitas melakukan kegiatan budaya bersama dengan aktifitas saling kunjung mengunjungi. Rasa kenyamanan tampak di antara mereka meskipun harus menyebrang wilayah perbatasan dengan medan yang tidak mudah. Dapat dilihat dengan contoh tersebut, jangankan di antara komunitas yang sama dan dalam satu negara, dengan komunitas yang memiliki etnisitas yang sama, tetapi kewarganegaraan yang berbeda masih dapat dilakukan perekatan sosial budaya yang sudah lama tampak dapat dilakukan secara bersinergi. Peningkatan kawasan wisata pun sudah dilakukan oleh komunitas yang berada di wilayah Kalimantan Malaysia yang berkunjung ke wilayah Kalimantan Indonesia.

Tentu selain, kawasan perbatasan seperti antara Malaysia dan Indonesia, masih banyak dapat dilakukan kajian berkenaan dengan masalah yang sama di perbatasan Indonesia lainnya seperti dengan Filipina, Timor Leste di Atambua, dan beberapa kawasan lainnya. Pelajaran dari pengelolaan wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia dapat dijadikan model atau *lesson leart* bagi pengembangan kawasan perbatasan lainnya di Indonesia.

Ini adalah salah satu strategi membangun pariwisata dari wilayah pinggiran, dimana peran sejarawan, penggiat sejarah dan peminat sejarah dapat melakukannya. Namun demikian, ini tidak berarti, bahwa daerah-daerah yang tidak termasuk wilayah perbatasan sudah baik dalam mengelola kawasannya untuk dipromosikan dalam meningkatkan kepariwisataannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan di Bali misalnya disebutkan:

"Kepariwisataaan budaya Bali adalah kepariwisataaan yang berlandaskan pada budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang harmonis antara kepariwisataaan dan kebudayaan, keduanya berkembang secara sinergis, harmonis, serta berkelanjutan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya, dan lingkungan"

Penerapan tentang konsep pariwisata yang berlandaskan budaya dapat dilihat pada kegiatan agama dan ritual, pada khususnya dan Tri Hita Karana yang pada umumnya di Bali dalam kaitannya dengan pengelolaan subak ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Kegiatan Agama, Ritual, dan Tri Hita Karana

Manusia-Tuhan	Manusia-Manusia	Manusia-Lingkungan
<i>Mapag toya</i>	<i>Krama subak</i>	Distribusi air
<i>Ngendagin tanah</i>	<i>Nguun-sekaa</i>	Pengolahan lahan
<i>Nandur</i>	<i>Nguun-sekaa</i>	Menanam padi
<i>Kekambuhan</i>	<i>Nguun-sekaa</i>	Membersihkan gulma
<i>Biukukung</i>	Petani, penyabit rumput, peternak itik	Pemeliharaan

(Sumber: Windia, 2015: 75).

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana kuatnya relasi sosial budaya yang terjadi antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia, serta hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya. Banyak wisatawan yang datang ke Bali yang ingin menyaksikan tentang hubungan sosial budaya yang terjadi seperti bagaimana pelukis melakukan penuangan ide seninya dalam kaitannya dengan hubungan yang terjadi dalam konsep Tri Hita Karana. Wisatawan juga datang ke sawah-sawah menyaksikan apa yang dimaksud dengan pola organisasi subak, demikian juga bagaimana kaitan antara pertanian dan pariwisata dilakukan seperti adanya pengelolaan diving sebagaimana dapat dilihat di sekitar Sungai Ayung di Gianyar.

Tabel 2: Konsep Globalisasi dan Budaya Petani

Konsep globalisasi	Konsep Budaya Petani	Keterangan
Kompetisi	Koperasi	Petani dalam sistem subak bekerjasama untuk mendapatkan distribusi air irigasi secara adil.
Efisiensi	Efektivitas	Petani mendistribusikan air irigasi dengan sistem <i>one inlet and one outlet</i> .
Profit	Benefit	Ada sistem pinjam meminjam air irigasi antar petani dan antar subak. Untuk kemanfaatan air irigasi.
Individualistis	Kolektivitas (Kebersamaan)	Sistem saling pinjam air juga menunjukkan kolektivitas (kebersamaan).
Produktivitas	Sustainability	Petani tidak merusak alam untuk meningkatkan produktivitas, namun mereka memelihara alam sesuai kontur lahan dan kemiringan topografi, agar tidak erosi dan sebaliknya terjadi proses kontinuitas.

Pada Tabel 2 ditunjukkan tentang perbedaan antara konsep globalisasi dan konsep budaya petani yang banyak terjadi di masyarakat perdesaan di Indonesia. Didasari atas sifat

manusia yang cenderung individualistis, meskipun manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, dan liberal, tampak budaya petanilah yang mengalami proses transformasi (Sumiyati, Windia, dan Tika, 2017: 123).

Dalam kaitannya dengan sejarah agrarian (*agrarian history*) dan sejarah pariwisata (*tourism history*), tampaknya masalah hubungan ini dapat diangkat sebagai kajian dalam penulisan sejarah itu. Pada komunitas lokal yang berbasis pertanian, tampaknya nilai-nilai filsafat kehidupan dan pola kebertahanan itu dapat diamati hampir di seluruh komunitas yang ada di nusantara. Bagi penulis sejarah, ketrampilan menulis masalah ini juga hendaknya dikembangkan, sehingga potensi sosial budaya yang ada berbagai wilayah di Indonesia dapat dikembangkan, terutama untuk kawasan yang dahulu diabaikan (*outer Indonesia*) (Ardhana, 2013). Beberapa kawasan di Nusa Tenggara Timur seperti pemerintah kabupaten Ende di Nusa Tenggara Timur misalnya, bahkan sudah membuat roadmap pengembangan kawasan wisatanya. Kegiatan-kegiatan menggali potensi budaya ini sangatlah penting dalam era yang penuh persaingan ini, sehingga mampu meningkatkan potensi ekonomi lokal dalam kaitannya pengembangan wisata nusantara (Ardhana 2014).

Meskipun demikian perlu dicatat, bahwa tidak semua wilayah di Indonesia harus meniru apa yang sudah dilakukan di Bali. Tiap-tiap daerah hendaknya menggali potensi dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang bersifat khas, unggul, untuk dapat dipromosikan dan dijual dalam kaitannya dengan pengembangan dunia kepariwisataa. Bali misalnya sudah mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya. Akan tetapi, dalam aplikasinya tentu tidak berhasil secara sempurna, karena masih tampak berbagai persoalan tentang lingkungan yang masih melanda, sehingga ada keinginan untuk aplikasi pariwisata budaya ini peningkatan kualitas wisatawan yang datang ke Bali yang lebih dipertingkan, dan bukan hanya pariwisata massal sebagaimana sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Namun demikian, Bali tampaknya masih kuat mempertahankan tradisi lokalnya dalam menyiasati perkembangan globalisasi yang berlangsung deras. Dapat dilihat bahwa masih banyak daerah yang mengabaikan kekayaan tradisi seperti sebagai akibat berkembangnya globalisasi yang berlangsung cepat. Akhir-akhir ini pemerintah kabupaten/ kota sudah mulai mengembangkan kekayaan tradisi lokalnya.

Bahkan, badan internasional seperti UNESCO bekerjasama dengan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan Balai Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mulai memberikan dukungan untuk membangkitkan dan merevitalisasi tradisi budaya yang sudah punah, langka untuk

dikembangkan dengan unsur-unsur kebaruannya. Tidak mengherankan kemudian jika jumlah anggota JKPI semakin meningkat setiap tahunnya, bahkan beberapa kota di Indonesia seperti Surakarta, Denpasar dan Gianyar sudah terdaftar sebagai anggota kota pusaka internasional yang dikenal dengan *Organization of World Heritage Cities (OWHC)*. Aspek-aspek dari tradisi yang dapat dikembangkan dalam menunjang kepariwisataan nusantara adalah dengan mulai melakukan kajian-kajian seperti pembuatan peta jalan penelitian kepariwisataan (*roadmap*), cetak biru kegiatan kepariwisataan (*blueprint*), dan branding masalah kabupaten dan kota dalam kaitannya dengan masalah di kabupaten dan kota. Kajian-kajian yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung yang memiliki keunggulan sejagat (*oustanding universal value*), tarian tradisional, makanan tradisional, arsitektur tradisional, dan pakaian tradisionalnya hendaknya dapat diaplikasi tidak hanya oleh sejarawan sendiri, tetapi dapat dikomunikasikan dengan para *stakeholders* lainnya, baik dari pihak pengusaha dan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang bersangkutan (Ardhana, 2017c).

Generasi sekarang dengan dibantu kajian-kajian sejarah yang dilakukan oleh para sejarawan, penggiat sejarah, peminat sejarah hendaknya mampu mengangkat masalah seperti dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata, sehingga akan dapat memberikan kontribusi bagi komunitas mulai dari wilayah perbatasan, hingga wilayah kabupaten/ kota di seluruh Nusantara. Elaborasi terhadap ide-ide kreatif dan inovatif secara komprehensif dan komparatif terhadap tradisi lisan yang merupakan warisan budaya tentu memberikan kontribusi bagi penguatan kebudayaan lokal, sekaligus budaya nasional dalam kontribusinya dengan budaya universal (Ardhana, 2017b: 36).

V. Simpulan

Dari pembahasan tersebut di atas tampak, bahwa bagaimana nilai-nilai tradisi lisan yang sudah ada itu dapat juga dikembangkan tidak saja sebagai asset sosial budaya (*social and cultural assets*), tetapi dapat dikembangkan menjadi asset ekonomi (*economic assets*). Namun demikian, perlu dicatat, bahwa pertumbuhan ekonomi dan konteks meningkatkan kesejahteraan mereka tentu tidak cukup. Perlu dikembangkan pemikiran tentang masalah keseimbangan dalam artian bagaimana mewujudkan pembangunan budaya dan pemeliharaan lingkungan alam dapat dilakukan secara seimbang. Apabila ini dilakukan, tidak hanya masalah kesejahteraan dapat

diwujudkan, tetapi juga masalah keberagaman bagi kebutuhan komunitas lokal yang bersangkutan.

Di sinilah sejarawan, penggiat sejarah, pemisat sejarah hendaknya mampu mengkaji masalah-masalah ini dalam upaya meningkatkan dunia kepariwisataan di Kepulauan Nusantara. Jika komunitas-komunitas lokal dapat membangkitkan masalah ini dalam menunjang dunia kepariwisataan, maka tentu diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal bersangkutan. Banyak yang dapat dikerjakan terlebih-terlebih dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor: 3, Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memberikan peluang atau kesempatan lebih besar untuk mengemukakan ide-ide kreatif dan inovatif berkaitan dengan masalah pariwisata. Oleh karena itu, sejarawan, para penggiat sejarah, dan pemisat sejarah dimungkinkan pada era reformasi ini lebih mengapresiasi masalah tradisi lisan yang memiliki kearifan lokal untuk merevitalisasi nilai-nilai tradisi yang sudah ada dan telah diwariskan secara turun temurun untuk pembangunan dunia kepariwisataan nusantara yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris et al. 2015. *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ardhana, I Ketut. 2017a. "Penguatan Komunitas Lokal dan Pelestarian Tradisi di Wilayah Perbatasan". Makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional Tradisi Lisan Ke-10 dengan Tema, "Ingatan dan Tradisi untuk Masa Depan yang Lebih Baik", diselenggarakan oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) didukung oleh Pemerintah Kota Mataram dan Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Golden Palace Hotel di Mataram Nusa Tenggara Barat pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober.
- Ardhana, I Ketut. 2017b. "Significance of Cultural Studies in the Border Areas of Kaltara", dalam *Proceedings the International Seminar on "Building Collaboration and Network in a Globalized World"*. Denpasar: Postgraduate Program of Cultural Studies Faculty of Arts Udayana University.
- Ardhana, I Ketut. 2017c. "Gianyar as A Cultural Heritage City", dalam *Pusaka Budaya: Majalah Pelestarian Kota Pusaka Gianyar, Bali*. Edisi: 06 (Special Edition). Denpasar: Dinas Kebudayaan Gianyar.
- Ardhana, I Ketut, I Ketut Setiawan, Sulanjari dan AA Rai Wahyuni 2015. *Calonarang: Mitos, Magis dan Persepsi Kesejarahan Masyarakat Bali dan Jawa Timur*. Denpasar: LPPM Universitas Udayana.
- Ardhana, I Ketut 2014. *Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende*. Ende: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur dan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana.
- Ardhana, I Ketut. 2013. "Early Harbours in Eastern Nusa Tenggara", dalam John N. Miksic dan Goh Geok Yian, *Ancient Harbours in Southeast Asia: the Archaeology of Early Harbours and Evidence of Inter-Regional Trade*, SEAMEO SPAFA Regional Centre for Archaeology and Fine Arts, Bangkok.
- Ardhana, I Ketut. 2008. *Etnisitas, Pengembangan Sumberdaya Lokal dan Potensi Perdagangan Internasional dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nunukan Kalimantan Timur*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Ardhana, I Ketut, Jayl Langub, dan Daniel Chew. 2004. "Border of Kinship and Ethnicity: Cross-Border Relations between the Kelalan Valley, Sarawak and the Bawan Valley, East Kalimantan", dalam *Borneo Research Bulletin*, Vol. 35. University of Helsinki: Finland.

- Ardhana, I Ketut. 2000. *Nusa Tenggara Nacheinrichtung der Kolonialherrschaft*. Lehrstuhl für Sudostasienkunde Philosophische Fakultät Universität Passau, Passau.-Jerman.
- Caron, J. J. 1929. *Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok*.
- Foucault, Michel. 1976. *Arkeologi Pengetahuan*. (Terj. Inyik Ridwan Musir). Yogyakarta: IRCisoD.
- Goldschneider, Calvin. 1995. "Population, Ethnicity, and Nation Building: Themes, Issues and Guidelines", dalam *Population, Ethnicity and Nation Building*. Oxford: Westview Press.
- Pongtuluran, Yonathan. 2013. "Developing Economy in the Border of East Kalimantan", dalam *Academic Research International*, Vol. 4, No. 4 July.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurcahyo, Henri. 2017. *Memahami Budaya Panji*. Sidoarjo: Pusat Konservasi Budaya Panji.
- Shuhaimi, Nik Hassan Nik Abdul Rahman. 2016. "The Archeology of Later Prehistoric Ports and Pre-Melakan Entrepots and Evidence of Inter-Regional Trade in Malaysia", dalam John N. Miksic dan Goh Geok Yian (eds.). *Ancient Harbours in Southeast Asia: The Archeology of Early Harbours and Evidence of Inter-Regional Trade*. (Bangkok: SEAMEO SPAFA-Regional Center for Archeology and Fine Arts).
- Schwartz, H. J. E. F. 1900. *Aanteekeningen omtrent het Landschap Gianjar*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Staab, Christiane. 1997. *Balinesische Dorfororganisationen und ihre Bewertungen in der Literatur*. Passau: Lehrstuhl für Sudostasienkunde.
- Sumiyati, I Wayan Windia, I Wayan Tika. 2017. "Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Subak di Kabupaten Tabanan", dalam *Jurnal Kajian Bali*, Volume: 02, Nomor: 01, April 2017. Denpasar: Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana.
- Windia, I Wayan. 2015. "Religious Aspect in the System of Subak Irrigation, as A World Cultural Heritage in Bali", dalam *Bali Internship Field School: Towards Sustainable Cultural Landscape of Subak System*. Gianyar, 2nd—8th August.
- Wiratri, Amorisa 2010. "Profil Daerah Perbatasan Nunukan dan Tawau", (The Profile of Border Regions in Nunukan and Tawau), dalam Yekti Maunati dan I Ketut Ardhana et al. *Kontestasi Identitas dan Diaspora Bugis di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur-Sabah*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.